

ABSTRAK

Abdul Malik, 07210008, 2011, Penerapan Pajak dan Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing, Drs. M. Nur Yasin, M.Ag

KATA KUNCI: *Pajak, Zakat, Pegawai Negeri Sipil.*

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang pada bulan Juli 2010 mengeluarkan kebijakan dengan surat edaran Nomor Un.03./HM.01/1744/2010 kepada dosen dan karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III dan IV yang telah terkena *nishab* untuk menunaikan zakat profesi. Penarikannya akan terpotong secara otomatis oleh pihak keuangan saat menerima gaji sebesar 2,5 % dari yang diterima, dan zakat tersebut diserahkan untuk dikelola oleh pusat kajian zakat dan wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang. Padahal sebelumnya para dosen dan karyawan telah membayar pajak penghasilan sebagai warga Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dengan demikian terjadilah beban ganda (*double duties*) yaitu pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang, sebagai akibat dari kebijakan tersebut.

Penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah, yaitu: bagaimana penerapan pajak dan zakat secara bersamaan tersebut dianalisis melalui prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Masudi?

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa surat No. Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat profesi, buku hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi dan buku pajak itu zakat (uang Allah untuk kemaslahatan rakyat) karangan Masdar Farid Mas'udi. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang telah memenuhi syarat-syarat yang telah difatwakan Yusuf Qardhawi dan tidak bertentangan dengan islam demi kemaslahatan. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi Penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak selaras dengan praktek zakat dan pajak pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, karena telah terjadi beban ganda (*double duties*) dan tidak ada unsur keadilan.